

Proses Pengajuan Bosnia Herzegovina Menjadi Anggota Uni Eropa

Denada Faraswacyen L. Gaol[#]

[#] Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12260 E-mail: denada.faraswacyen@budiluhur.ac.id

Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses yang dilalui Bosnia Herzegovina dalam mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa. Status Bosnia Herzegovina sebagai kandidat potensial untuk menjadi negara anggota Uni Eropa telah diperoleh pada saat *Thessaloniki European Council Summit* Juni 2003. Namun status Bosnia Herzegovina sebagai salah satu negara potensial masih dalam posisi ditangguhkan (*suspension*) oleh Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menjelaskan proses yang sudah dan sedang dilalui oleh Bosnia Herzegovina dalam mengajukan keanggotaan kepada Uni Eropa. Hasil penelitian ini adalah proses Bosnia Herzegovina untuk dapat bergabung di Uni Eropa harus memenuhi syarat dalam Kriteria Kopenhagen yang ditentukan oleh Uni Eropa yaitu kriteria substantif dan formal. Kriteria substantif meliputi politik dan ekonomi. Kriteria formal meliputi negosiasi, *level of agreement*, dan aktor. Berdasarkan kriteria tersebut, ada beberapa kriteria yang belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Bosnia Herzegovina, seperti situasi politik dan pemerintahan yang belum stabil dan belum demokratis. Pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah politik, sosial, dan ekonomi, banyaknya demonstrasi, kasus kemanusiaan, diskriminasi kaum perempuan dan minoritas. Proses Bosnia Herzegovina untuk diterima menjadi negara anggota Uni Eropa pada tahun 2016 tergantung dari kemampuan pemerintahnya dalam mengendalikan stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri.

Kata Kunci — demokrasi, Kriteria Kopenhagen, Uni Eropa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bosnia Herzegovina bersama dengan negara Balkan Barat lainnya telah diidentifikasi sebagai negara kandidat potensial untuk menjadi negara anggota Uni Eropa di *Thessaloniki European Council Summit* pada Juni 2003.¹ Hanya saja status Bosnia Herzegovina sebagai salah satu negara potensial masih dalam posisi ditangguhkan keanggotaannya. Penangguhan keanggotaan Bosnia Herzegovina memunculkan tiga asumsi sementara yakni: *pertama*: hubungan kelimah Bosnia Herzegovina dengan Uni Eropa karena gagal dalam mengurangi konflik khususnya pada perang etnis Bosnia Herzegovina satu dekade yang lalu. *Kedua*: Uni Eropa juga memiliki kekhawatiran akan destabilisasi di Eropa Timur yang akan menyebabkan arus besar pengungsi arah barat serta kondisi politik dalam negeri Bosnia Herzegovina yang tidak stabil. *Ketiga*: lebih dari satu dekade sejak terbentuknya Perjanjian Dayton yang menempatkan sistem *check and balances* dalam politik Bosnia Herzegovina, negara tersebut terjebak dalam ketidakstabilan politik dan saling curiga antaretnis. Perang antaretnis yang berlangsung bahkan memiliki dampak hingga saat ini. Meskipun tiga faktor ini menjadi analisis sementara,

namun dalam perkembangannya Bosnia Herzegovina terus menjalani proses aksesi yang menjadi prasyarat dari Uni Eropa

Bosnia Herzegovina bersama dengan negara Balkan Barat lainnya telah diidentifikasi sebagai negara kandidat potensial untuk menjadi negara anggota Uni Eropa di *Thessaloniki European Council Summit* pada Juni 2003.² Hanya saja status Bosnia Herzegovina sebagai salah satu negara potensial masih dalam posisi ditangguhkan keanggotaannya. Penangguhan keanggotaan Bosnia Herzegovina memunculkan tiga asumsi sementara yakni: *pertama*: hubungan kelimah Bosnia Herzegovina dengan Uni Eropa karena gagal dalam mengurangi konflik khususnya pada perang etnis Bosnia Herzegovina satu dekade yang lalu. *Kedua*: Uni Eropa juga memiliki kekhawatiran akan destabilisasi di Eropa Timur yang akan menyebabkan arus besar pengungsi arah barat serta kondisi politik dalam negeri Bosnia Herzegovina yang tidak stabil. *Ketiga*: lebih dari satu dekade sejak terbentuknya Perjanjian Dayton yang menempatkan sistem *check and balances* dalam politik Bosnia Herzegovina, negara tersebut terjebak dalam ketidakstabilan politik dan saling curiga antaretnis. Perang antaretnis yang berlangsung bahkan memiliki dampak hingga saat ini. Meskipun tiga faktor ini menjadi analisis sementara,

¹ Chandler, D. (2005). *From Dayton to Europe. International Peacekeeping*, 12(3), 336 – 349.

² *ibid.*

namun dalam perkembangannya Bosnia Herzegovina terus menjalani proses aksesi yang menjadi prasyarat dari Uni Eropa

Pasca Perang Dunia II, negara-negara di Eropa Timur berupaya melakukan transformasi dari sistem politik sosial-komunis menuju sistem demokrasi. Transformasi ini dikategorikan sebagai Gelombang Demokrasi III yang dikemukakan Samuel Huntington.³ Salah satu negara di dalam transformasi Gelombang Demokrasi III tersebut ialah Bosnia Herzegovina (*Bosnia and Herzegovina*). Transisi Bosnia Herzegovina menuju sistem demokrasi yang ideal terlihat dari pilihan negara ini untuk masuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Tujuan utama ialah untuk mengasosiasikan perekonomiannya serta mengubah sistem pemerintahannya. Terhitung sejak tahun 2000, Bosnia Herzegovina berstatus negara kandidat potensial keanggotaan Uni Eropa. Sejak itu negara ini wajib melaksanakan proses aksesi *Stabilisation and Association Process (SAP)* yang dibuat Uni Eropa bagi lima negara dari wilayah Balkan Timur.⁴

Bosnia Herzegovina bersama dengan negara Balkan Barat lainnya telah diidentifikasi sebagai negara kandidat potensial untuk menjadi negara anggota Uni Eropa di *Thessaloniki European Council Summit* pada Juni 2003.⁵ Hanya saja status Bosnia Herzegovina sebagai salah satu negara potensial masih dalam posisi ditangguhkan keanggotaannya. Penangguhan keanggotaan Bosnia Herzegovina memunculkan tiga asumsi sementara yakni: *pertama*: hubungan kelimah Bosnia Herzegovina dengan Uni Eropa karena gagal dalam mengurangi konflik khususnya pada perang etnis Bosnia Herzegovina satu dekade yang lalu. *Kedua*: Uni Eropa juga memiliki kekhawatiran akan destabilisasi di Eropa Timur yang akan menyebabkan arus besar pengungsi arah barat serta kondisi politik dalam negeri Bosnia Herzegovina yang tidak stabil. *Ketiga*: lebih dari satu dekade sejak terbentuknya Perjanjian Dayton yang menempatkan sistem *check and balances* dalam politik Bosnia Herzegovina, negara tersebut terjebak dalam ketidakstabilan politik dan saling curiga antaretnis. Perang antaretnis yang berlangsung bahkan memiliki dampak hingga saat ini. Meskipun tiga faktor ini menjadi analisis sementara, namun dalam perkembangannya Bosnia Herzegovina terus menjalani proses aksesi yang menjadi prasyarat dari Uni Eropa.

B. Tinjauan Pustaka

1) Demokrasi

³ Huntington, S. P. (1991). *Democracy's Third Wave*. *Journal of Democracy*, 2 (2), 12 – 34.

⁴ Schimmelfenning, Frank and Ulrich Sedelmeier. (2005). *The Politics of European Union Enlargement*. New York: Routledge.

⁵ Chandler, D. (2005). *From Dayton to Europe*. *International Peacekeeping*, 12(3), 336 – 349.

Pasca Perang Dunia I dan II terdapat berbagai sistem politik yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Dalam perkembangannya, sistem demokrasi menjadi sistem yang berkembang lebih cepat dibandingkan sistem politik lainnya. Hal ini terlihat dari perkembangan sistem demokrasi yang terbagi ke dalam tiga gelombang yang dikemukakan oleh Samuel Huntington.⁶ Ketiga gelombang tersebut memiliki kriterianya masing-masing, antara lain: Gelombang Demokrasi I (1820 – 1918) ditandai dengan lahirnya nasionalisme dan kegagalan modernisasi demokrasi pertama. Negara-negara pada demokrasi gelombang ini memiliki posisi yang kuat dalam ekonomi global sehingga negara-negara tersebut menemukan basis demokrasi mereka. Gelombang Demokrasi II (1945 – 1962) memiliki ciri dekolonisasi dan kegagalan demokrasi yang kedua. Pada periode ini terjadi perubahan sistem multilateral ke arah sistem bipolar.

Hal ini dampak dari Perang Dunia II bahwa negara-negara Eropa bersaing menguasai pasar-pasar di Afrika, Asia dan benua Amerika.⁷ Gelombang demokrasi III ditandai sejak tahun 1974 hingga saat ini memiliki karakteristik dengan menyatunya ekonomi politik internasional. Pada gelombang ini proses demokratisasi ditempuh oleh masyarakat di berbagai wilayah di seluruh dunia. Adapun proses tersebut terdiri atas tiga jalur: *Jalur pertama*: rejim-rejim yang lebih terbuka dimulai dari pemerintahan militer, misalnya: Yunani, Spanyol, Portugal, Brasil, Argentina, dan Chili. *Jalur kedua*: transisi yang muncul dari rejim otoritarian dikuasai oleh partai dominan tunggal, misalnya: Taiwan, Filipina, dan Afrika Selatan. *Jalur ketiga*: transisi terakhir yang dimulai dari rejim yang didominasi oleh oligarki komunis, misalnya: Eropa Tenggara dan negara-negara eks-Uni Soviet.

Bosnia Herzegovina termasuk dalam jalur ketiga yakni sebagai salah satu negara Eropa Tenggara yang berupaya menjalani proses demokratisasi. Huntington menekankan bahwa pada era ini masyarakat sipil seperti keluarga, marga, suku atau gereja memiliki peran penting yang menentukan transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi.

2) Kriteria Kopenhagen (*Copenhagen Criteria*)

Kriteria Kopenhagen menjadi *tools* atau parameter dalam mengukur sejauh mana Bosnia Herzegovina telah melaksanakan aksesinya. Pada dasarnya hak dan kewajiban bagi Uni Eropa dan negara-negara anggota berasal dari keanggotaan Uni Eropa. Semua negara anggota adalah sama, yakni bahwa mereka menikmati hak istimewa yang sama dan harus memenuhi kewajiban yang sama vis-à-vis

⁶ Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Vol. 4). University of Oklahoma Press.

⁷ Huntington, S. P. (1993).

satu sama lain, dan vis-à-vis dengan Uni Eropa. Keanggotaan Uni Eropa yang diatur dalam Pasal 49 TFEU, dapat ditangguhkan ketika suatu negara anggota mengabaikan nilai-nilai dasar yang didirikan Uni Eropa, dan dapat diakhiri berdasarkan Pasal 50 TFEU.⁸

Berikut tiga prosedur khusus yang berlaku bagi keanggotaan Uni Eropa. Prosedur tersebut ialah *admission procedure* (prosedur penerimaan), *suspension procedure* (prosedur penundaan) dan *withdrawal procedure* (prosedur penolakan). Dalam *Admission Procedure* (Prosedur Penerimaan) terdapat dua persyaratan yaitu Substantif dan Formal yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan membandingkan akses yang dilakukan negara pemohon, dalam hal ini ialah Bosnia Herzegovina. KTT Kopenhagen menetapkan tiga persyaratan substantif, bahwa setiap negara kandidat harus memenuhi: *Kriteria Politik*: Calon negara anggota merupakan negara berdaulat. Hal ini artinya berdasarkan hukum publik internasional, negara kandidat harus memiliki lembaga yang stabil dan menjamin bahwa nilai-nilai Uni Eropa yang telah ditetapkan harus dihormati; *Kriteria Ekonomi*: Calon negara anggota harus memiliki ekonomi pasar yang berfungsi dan mampu mengatasi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di dalam Uni Eropa; *Kriteria Hukum*: Negara kandidat harus mampu memenuhi kewajiban keanggotaan Uni Eropa, termasuk menerima secara objektif baik politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa. Hal ini mencakup dalam menerima seluruh badan hukum Uni Eropa yang dikenal sebagai "*Uni Eropa Acquis*" yang sebelumnya disebut sebagai "*Acquis Communautaire*". Selain itu, Pasal 49 TEU juga menetapkan persyaratan substantif keempat untuk masuk ke Uni Eropa (yang tidak secara tegas disebutkan oleh Kopenhagen) yaitu kriteria geografis. Kriteria ini artinya, calon negara anggota harus merupakan satu kesatuan dari daratan Eropa.

Formal Requirements Selanjutnya, Pasal 49 TEU menetapkan persyaratan Formal bagi keanggotaan Uni Eropa. Ketentuan ini menyatakan bahwa: "Setiap negara Eropa yang menghormati nilai-nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan berkomitmen untuk meningkatkan kemajuan negara mereka, maka dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Parlemen Eropa dan Parlemen Nasional wajib diberi tahu mengenai aplikasi ini. Negara pemohon harus mengirimkan aplikasi kepada dewan, yang akan bertindak berdasarkan suara bulat setelah berkonsultasi dengan komisi dan setelah menerima persetujuan dari Parlemen Eropa, yang akan bertindak berdasarkan komponen mayoritas anggotanya. Kondisi kelayakan

tersebut kemudian akan disetujui oleh Dewan Eropa dan akan dipertimbangkan."

Suspension procedure atau prosedur suspensi merupakan tahapan bagi negara kandidat yang melanggar aturan Uni Eropa, atau melakukan hal-hal yang berisiko bagi Uni Eropa. Ada dua tahap dalam prosedur berdasarkan Pasal 7 (2) TEU. Pertama, berkaitan dengan penentuan adanya pelanggaran serius dan terus-menerus oleh suatu negara anggota terhadap nilai-nilai fundamental Uni Eropa. Kedua berhubungan dengan keputusan, baik untuk menangguhkan atau tidak menangguhkan hak keanggotaan Uni Eropa, yang dapat diambil oleh Dewan Eropa setelah Dewan telah menetapkan adanya pelanggaran serius dan gigit Pasal 2 TEU.

Suatu negara anggota yang tidak lagi ingin menjadi anggota Uni Eropa harus memberi tahu Dewan Eropa tentang keinginannya untuk meninggalkan Uni Eropa. Setelah pemberitahuan, prosedur yang diatur dalam Pasal 50 TEU akan diterapkan, yaitu melakukan negosiasi antara Uni Eropa dan negara anggota yang bersangkutan untuk menyimpulkan kesepakatan menarik negaranya, menentukan pengaturan untuk menarik negaranya dan mengatur masa depan hubungan antara Uni Eropa dan negara yang bersangkutan. Dewan Uni Eropa akan menyimpulkan perjanjian ini atas nama Uni Eropa, bertindak berdasarkan suara terbanyak yang memenuhi syarat (negara yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk memilih), dan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Uni Eropa. Negara yang bersangkutan akan berhenti menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian penarikan sebelumnya.

Ketiga prosedur khusus yang berlaku bagi keanggotaan Uni Eropa tersebut menjadi parameter bagi masuknya Bosnia Herzegovina ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Maka setiap prosedur tersebut akan dihitung sesuai dengan Kriteria Kopenhagen kemudian diberi nilai dan akan dibandingkan yang mana yang lebih prioritas.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif analitis yakni bermaksud menggambarkan dan menganalisis tentang proses yang sudah dan sedang dilalui oleh Bosnia Herzegovina dalam mengajukan negaranya menjadi anggota Uni Eropa. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui studi pustaka, dengan cara teknik pengumpulan data

⁸ Kaczorowska, A. (2008). *European Union Law*. Rout ledge.

melalui literatur-literatur terkait proses Bosnia Herzegovina menjadi anggota Uni Eropa.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengajuan Bosnia Herzegovina untuk dapat diterima menjadi negara anggota adalah harus memenuhi Kriteria Kopenhagen yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Skenario ditunda atau ditangguhkan keanggotaannya memang sangat tinggi mengingat masih banyak proses akses yang sedang dilakukan, bahkan baru mulai dilakukan. Kemungkinan ditolak sangat tinggi dibandingkan kemungkinan untuk diterima oleh Uni Eropa. Hal tersebut artinya, status diterima masih sangat jauh bagi Bosnia Herzegovina. SAA yang telah berlaku sejak tahun 2009 dinyatakan belum memenuhi standar Eropa. Negara tersebut dinilai belum memenuhi kewajibannya. Skenario yang menjadi prioritas Bosnia utamanya ialah menguatkan kriteria *substantive*. Pemenuhan kewajiban akses dalam kriteria ini dinilai lebih penting karena apabila tidak juga dipenuhi, maka akan mempengaruhi pemenuhan kriteria formal. Berikut ini penjelasan Kriteria Kopenhagen yang dilalui oleh Bosnia Herzegovina dalam proses pengajuan keanggotaan kepada Uni Eropa.

A. *Substantif*

Dalam proses pengajuan Bosnia Herzegovina menjadi negara anggota Uni Eropa harus lebih memprioritaskan kriteria substansif dibandingkan kriteria formal. Kriteria formal lebih rendah karena Bosnia telah melakukan pencapaian dalam *level of agreement* juga negosiasi yang dinilai terus meningkat.

1) Kriteria Politik

Berdasarkan Kriteria Kopenhagen, kriteria politik merupakan salah satu faktor penting bagi negara kandidat. Dalam hal ini ditekankan bahwa Bosnia Herzegovina wajib memiliki lembaga stabilitas yang menjamin berjalannya demokrasi, supermasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan dan perlindungan kaum minoritas. Hal ini termasuk juga kerja sama regional, hubungan bertetangga baik dengan negara-negara *enlargement*, dan negara anggota Uni Eropa, sesuai dengan kewajiban internasional seperti kerja sama dengan *International Criminal Tribunal* Yugoslavia.

Masyarakat Sipil; Parlemen Bosnia Herzegovina dinilai gagal dalam mengadopsi amandemen *Single Reference Number* tepat waktu, dikarenakan divergensi politik negara tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa ribu anak yang baru lahir tidak mendapatkan kesehatan dan manfaat sosial. Kurangnya koordinasi sistematis dengan *cantonal assemblies* (majelis kewilayahan) memiliki dampak negatif dalam pendekatan yang berhubungan dengan UU Uni Eropa. Fungsi dari federasi yang terhambat

oleh perombakan pemerintahan di negara tersebut telah berdampak negatif terhadap fungsi dan kontribusi terhadap fragmentasi di semua tingkat dalam membuat kebijakan. Perbedaan pendapat politik ini terus memberikan dampak negatif pada fungsi majelis yang semakin melemah, khususnya setelah banyak terjadi demonstrasi pada Juni 2013. Masyarakat Bosnia Herzegovina telah lebih terbuka matanya dalam melihat ketidakseimbangan pemerintahannya. Hal ini memperburuk situasi atas faktor politik negara tersebut.

Civil Society; Kerja sama dengan masyarakat sipil di tingkat lokal telah meningkat. Pada Negara, Badan dan tingkat *Cantonal*, kerja sama memang masih lemah. Mekanisme kelembagaan untuk kerja sama dengan masyarakat sipil tidak sepenuhnya beroperasi pada tingkat *entity* dan sangat kurang dalam tingkat negara. Transparansi dalam alokasi dana untuk organisasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan. Masyarakat sipil menjadi semakin tegas dalam mengungkapkan ketidakpuasan dengan perkembangan politik, seperti keterlambatan dalam mengadopsi undang-undang *Single Reference Number* yang telah disebutkan sebelumnya.

Demokrasi; Upaya Bosnia yang dipimpin oleh Dewan Menteri untuk menentukan mekanisme dan koordinasi yang efektif antar berbagai tingkat pemerintahan untuk melaksanakan dan menegakan hukum Uni Eropa tidak membuahkan hasil. Kemajuan yang sangat terbatas dalam mereformasi administrasi publik. Fragmentasi dan politisasi dari sistem pelayanan sipil tetap menjadi isu yang memprihatinkan. Pengembangan akuntabel, transparan dan efisien dalam melayani publik membutuhkan perhatian lebih lanjut pada semua tingkat pemerintahan. Begitupun dengan lembaga-lembaga audit tertinggi yang harus melanjutkan kerja sama. Tidak adanya keseimbangan pemerintah pusat dan lokal menjadi fokus utama dalam menilai demokrasi di Bosnia Herzegovina.

Hak Asasi Manusia; Bosnia Herzegovina telah meratifikasi seluruh konvensi HAM internasional. Mahkamah menyampaikan terdapat 24 laporan yang menyatakan bahwa Bosnia Herzegovina telah melanggar hak-hak yang dijamin oleh Konvensi. Kasus ini berhubungan antara lain perihal kerusakan akibat perang dan kemungkinan tabungan mata uang asing yang disimpan sebelum pembubaran bekas Yugoslavia. Kompleksitas dan tidak efisiennya lembaga pemerintahan Bosnia Herzegovina membuat negara tersebut sulit menuju Uni Eropa. *Alternative withdraw* bahkan lebih besar daripada *alternative acceptance*.

2) Kriteria Ekonomi

Dalam pantauan perkembangan di Bosnia Herzegovina, Uni Eropa menitikberatkan pada

keberadaan ekonomi pasar yang berdasarkan pada Kriteria Kopenhagen, di antaranya:

Sistem Moneter; Pertumbuhan kredit korporasi maupun ritel berjalan secara lamban dan meningkat kembali pada kuartal pertama tahun 2014. Besarnya potensi *crowding out* sebagai dampak dari penurunan investasi dan apresiasi nilai mata uang sebagai akibat naiknya tingkat bunga karena stimulus fiskal,⁹ membuat bank sentral mengambil langkah untuk melakukan percepatan peningkatan deposito menjadi 7.8% pada bulan Juni 2014 setelah sebelumnya tumbuh sebesar 6.9% pada 2013. Secara keseluruhan, kebijakan moneter telah berjalan dengan baik di bawah pengaturan Dewan Mata Uang *Euro* walaupun masih banyak hal yang perlu untuk dibenahi.¹⁰

Kebijakan Perpajakan; Konsensus pada tingkat pemerintah telah menghasilkan kesepakatan pada strategi fiskal Bosnia Herzegovina jangka menengah, yaitu "Kerangka Kerja Global Perimbangan Keuangan dan Kebijakan untuk 2014 – 2016 dan 2015 – 2017". Konsensus juga mencapai kesepakatan mengenai beberapa langkah reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesinambungan fiskal. Merujuk pada kerangka kerja, pada Januari 2014 pemerintah mengajukan *Economic and Fiscal Programme (EFP)* untuk periode tahun 2014 – 2016. Program ini berisi tahapan-tahapan pemulihan ekonomi yang berdasarkan pada penguatan permintaan domestik, tetapi pada saat yang sama menekan reformasi struktural.¹¹

Ekonomi Internasional; Keterbukaan ekonomi diukur dari total impor dan ekspor barang serta jasa yang dilakukan oleh negara Bosnia Herzegovina terhadap negara mitra. Pada tahun 2013, jumlah total keseluruhan ekspor dan impor adalah 80% dari *GDP* yang mengalami penurunan 1% dibandingkan dengan tahun 2012 akibat penurunan jumlah impor, meskipun ekspor sedikit meningkat. Pada tahun 2014, nilai perdagangan Bosnia Herzegovina mengalami peningkatan menjadi 91% dari *GDP*.

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar bagi Bosnia Herzegovina. Pada tahun 2014, nilai ekspor barang Bosnia Herzegovina mengalami penurunan terutama dengan Kroasia sebesar 20% dan mengalami stagnan dengan Jerman. Namun dari sisi impor, terdapat peningkatan sebesar 4.8%, dari hubungan dagang antara Bosnia Herzegovina dengan Italia dan Austria. Secara keseluruhan, tingkat integrasi perdagangan Uni Eropa dengan Bosnia Herzegovina sudah mengalami peningkatan walau

masih perlu pembenahan peraturan untuk membuka perdagangan untuk lebih terintegrasi.¹²

Infrastruktur; Secara umum, kebijakan transportasi masih harus diadopsi. Dokumen-dokumen strategis untuk transportasi umum dan semua transportasi subsektor juga perlu disusun dan diadopsi. Selain itu perlu adanya peningkatan kerja sama yang lebih kuat dengan *SEETO (South-East Europe Observatory Network)* untuk pembentukan jaringan transportasi umum di Bosnia Herzegovina ke wilayah Balkan Barat dan Uni Eropa. Selain itu, transportasi intermoda juga masih banyak mengalami hambatan terutama pada pengembangan transportasi gabungan antara Kereta Ro-La dengan Pelabuhan Ploče.

Pada transportasi udara, terjadi sedikit kemajuan yang merupakan hasil dari pengimplementasian Perjanjian *European Common Aviation Area* yang banyak membahas mengenai keselamatan penerbangan. Mengenai transportasi laut, Bosnia Herzegovina belum banyak terlibat dengan *International Maritime Organisation Conventions* seperti *the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic* ataupun *International Convention for the Safety of Life at Sea*. Secara keseluruhan, Bosnia Herzegovina telah melakukan sedikit perkembangan dalam sisi transportasi. Namun demikian, perlu adanya perbaikan baik secara hukum maupun strategi pembenahan transportasi.

B. Formal

Kriteria formal dipenuhi beberapa proses yang berhubungan langsung dengan aktor pemerintahan. Sejak awal sebenarnya Uni Eropa telah menyatakan bahwa Bosnia tidak dapat mengajukan permohonan kredibel bagi keanggotaannya, sampai *Office of the High Representative (OHR)* yang berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton telah ditutup. Kegagalan Bosnia dalam memenuhi syarat untuk menutup *OHR*, termasuk menangani masalah kepemilikan negara dan militer dalam melaksanakan reformasi konstitusi telah mencegah mereka untuk mengajukan permohonan hingga saat ini.

1) Negosiasi

Bagian ini membahas lebih jauh mengenai *screening* yang dilakukan organisasi non pemerintah dalam melihat status Bosnia Herzegovina di Uni Eropa, proses negosiasi dan kesepakatan yang terjalin sebagai salah satu Kriteria Kopenhagen, yang di antaranya:

Screening; Selain pengamatan yang dilakukan oleh Uni Eropa, beberapa lembaga non pemerintah turut meresponi dialektika yang terjadi di negara

⁹ Teguh Pamuji, Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia, diakses melalui

<http://core.ac.uk/download/pdf/11717596.pdf>, Program Studi Magister Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, hlm xlvi

¹⁰ *Loc. cit*

¹¹ *Bosnia and Herzegovina Progress Report. Oktober 2015, 31*

¹² Vachudova, M. A. (2014). *EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzles of Enlargement Ten Years on JCMS: Journal of Common Market Studies*, 52(1), 122 – 138.

Bosnia Herzegovina. Salah satunya adalah organisasi *Freedom House* yang melihat bahwa terjadinya penurunan stabilitas ekonomi paska krisis 2012 dan situasi politik yang juga tidak stabil akibat pemilihan umum tahun 2014 menyebabkan Uni Eropa mengambil keputusan untuk menarik pendanaan dan pemberian hibah. Penurunan stabilitas ekonomi terus terjadi dan diperparah dengan bencana banjir pada tahun 2015 yang merusak sejumlah besar perumahan, pabrik industri, dan fasilitas umum. Lebih lanjut, hingga memasuki tahun 2014 Bosnia Herzegovina dianggap telah gagal untuk mengubah konstitusi negara sesuai dengan ketetapan *European Court of Human Right (ECHR)*. Hal ini mengindikasikan sulitnya negara tersebut untuk bergabung dalam Uni Eropa.

Pada tataran masyarakat sipil, demonstrasi melawan pemerintah masih sering terjadi. Hal ini diperkuat dengan tingginya angka korupsi sehingga melemahkan posisi pemerintah di mata masyarakat. Namun memasuki 2015, kepercayaan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan meski angkanya tidak signifikan. Di lain pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang seharusnya memiliki posisi tawar dalam pemerintah, masih terbilang lemah dalam mempengaruhi keputusan politis di negara tersebut.¹³ Dari sisi perlindungan Hak Asasi Manusia, Sasa Gavric yang merupakan Direktur Eksekutif dari *Sarajevo Open Centre* mengatakan bahwa tidak ada yang banyak berubah sejak empat tahun lalu bahwa situasi negara masih tidak kooperatif bagi kaum minoritas, terutama LGBT. Kaum ini adalah satu-satunya kelompok yang tidak memiliki perlindungan hukum secara khusus di negara Bosnia Herzegovina.¹⁴ Selaras dengan yang disampaikan oleh Sasa Gavric, organisasi *Freedom House* pun melihat bahwa tingkat terjadinya kasus diskriminasi yang dialami oleh kaum wanita dan minoritas masih cenderung tinggi.¹⁵ Lebih lanjut, *Human Rights House Foundation (HRHF)* pun mencatat beberapa pelanggaran terhadap Konvensi Eropa mengenai HAM yang dilakukan oleh negara Bosnia Herzegovina, di antaranya¹⁶: Penanguhan yang dilakukan hakim pelaksana pada kasus dalam kasus Sejdić-Finci, banyak kasus intimidasi dan ancaman terhadap jurnalis dan editor serta politisasi media menjelang pemilu Oktober 2014, terdapat upaya untuk menghambat kebebasan berkumpul dan

berserikat serta tindakan yang mengancam kelompok pembela HAM.

Diskusi; Berdasarkan Pasal 12 dan 15, Bosnia wajib untuk memulai negosiasi dengan negara-negara SAA lainnya. Negosiasi tersebut meliputi pembentukan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara non-Uni Eropa; konsisten dengan ketentuan *WTO* yang relevan dan saling berkaitan dengan *WTO*, gerakan buruh, penyedia jasa, gerakan modal yang setara dengan orang-orang di dalam SAA, serta penyelesaian konflik. Merujuk pada hal tersebut, dalam bidang kerja sama perdagangan antara Bosnia Herzegovina dan Uni Eropa, dilakukan negosiasi yang mewajibkan negara tersebut untuk mengadaptasi *IA/SAA* demi mempermudah penghitungan perdagangan bilateralnya dengan negara-negara SAA lainnya. Namun, sampai menjelang tahun 2015 negosiasi belum mencapai titik temu yang diharapkan sehingga Uni Eropa menetapkan kerja sama perdagangan bersyarat sampai negara tersebut mengadaptasi *IA/SAA*. Walaupun belum mencapai kesepakatan yang diinginkan, Bosnia Herzegovina telah terlibat dalam diskusi yang konstruktif dengan Uni Eropa dan menyetujui adaptasi beberapa hal teknis untuk situasi mendesak.

Mengenai negosiasi dengan *WTO*, tidak ada perkembangan yang berarti. Bosnia Herzegovina masih perlu berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dengan Brazil dan Ukraina dan menanggapi kesepakatan perdagangan dengan Federasi Rusia dan Indonesia. Dalam menangani kejahatan lintas batas negara, Bosnia Herzegovina melakukan pertemuan dengan *Europol* yang kemudian dilanjutkan dengan pengadopsian keputusan sementara yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Namun demikian, perjanjian operasional yang diharapkan belum mencapai kesepakatan.¹⁷ Bosnia Herzegovina pun juga berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam program *EU's COSME* tahun 2015 – 2020 yang bertujuan untuk menciptakan daya saing perusahaan maupun usaha kecil menengah, walau keterlibatannya masih dalam dinegosiasikan.¹⁸

Dalam negosiasinya, Bosnia Herzegovina menyepakati untuk mengadopsi UU Federasi pada perdagangan multilateral dan mengadopsi buku aturan pemantauan penggunaan *Genetically Modified Organism (GMO)*. Lebih lanjut, negara ini juga telah selesai menandatangani kerja sama perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat, Ekuador, dan Panama. Sedangkan negosiasi kerja sama dengan Brazil masih perlu direvisi dan perjanjian perdagangan bebas dengan Ukraina masih perlu disesuaikan. Pada bulan Juni 2014, Bosnia Herzegovina dan Komisi Eropa menyepakati EU

¹³ *Freedom House Organization, (2015), Bosnia Herzegovina*, diakses melalui <https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/bosnia-and-herzegovina> pada tanggal 05 Feb 2016

¹⁴ *Human Right House Foundation, (2014), Bosnia and Herzegovina: chance to take steps to improve its human rights record*, diakses melalui <http://humanrightshouse.org/Articles/20500.html> pada tanggal 05 Feb 2016

¹⁵ *Freedom House Organization, Loc.cit*

¹⁶ *Human Right House Foundation, Loc.cit*

¹⁷ *Ibid*, hal 19

¹⁸ *Ibid*, hal 48

Competitiveness of Enterprise and Small and Medium-sized Enterprises Programme. Pada Juli 2015, disepakati pembentukan undang-undang tentang tenaga kerja yang dibuat selaras dengan ketentuan agenda reformasi yang disepakati oleh Uni Eropa dan Bosnia Herzegovina.

2) *Level of Agreement*

Bagian ini akan melihat perkembangan jalinan kerja sama sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan dalam Kriteria Kopenhagen, yaitu:

Asosiasi; Bosnia Herzegovina bersama dengan *OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe)* menyepakati perjanjian kerja sama kawasan.¹⁹ Selain itu, negara ini juga telah mencapai kesepakatan akhir untuk bergabung dalam keanggotaan *WTO* yang diharapkan mampu memberi keuntungan dalam bidang perdagangan.²⁰ Bosnia Herzegovina mencapai kesepakatan untuk mendukung perlindungan hak cipta di bidang properti dan industri setelah bekerja sama dengan Uni Eropa.

Kemitraan; Bosnia Herzegovina terus berusaha meningkatkan kemitraan dengan negara-negara lain, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Kesepakatan kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Republik Kroasia, Serbia, dan Montenegro pun kemudian terjalin di atas asas kepentingan bersama, prinsip-prinsip kesetaraan, serta saling menghormati kedaulatan dan integritas. Negara ini juga menjalin kesepakatan bersama negara anggota "*The Peace Implementation Council Steering Board*". Lebih lanjut, bersama dengan Amerika Serikat dan *NATO*, Bosnia Herzegovina juga menyepakati kerja sama di bidang keamanan. Bersama dengan PBB, Bosnia Herzegovina juga membentuk Komitmen Kontra-Terrorisme sebagai upaya perlawanan terhadap terorisme dan kejahatan terorganisir.

3) *Actor*

Bagian ini akan melihat perkembangan pola pemerintahan dan perannya sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan dalam Kriteria Kopenhagen:

Perdana Menteri; Meninjau lebih jauh, sistem pemerintahan di Bosnia Herzegovina merupakan sistem yang sangat kompleks sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Doris Pack dari *German Centre-*

Right MEP dalam laporannya mengenai Bosnia Herzegovina yang mengatakan bahwa perlu adanya perombakan struktur politik secara menyeluruh karena sistem yang ada sampai saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Lebih jauh disampaikan bahwa sistem dengan 13 perdana menteri dan hampir 150 menteri ini sangat berpotensi menciptakan peluang korupsi pada setiap bagian pemerintahan.²¹ Di sisi lain, Bosnia Herzegovina juga memiliki tiga presiden yang semakin mempertegas kompleksitas pemerintahan negara tersebut.²²

Meninjau lebih jauh, sistem pemerintahan di Bosnia Herzegovina merupakan sistem yang sangat kompleks sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Doris Pack dari *German Centre-Right MEP* dalam laporannya mengenai Bosnia Herzegovina yang mengatakan bahwa perlu adanya perombakan struktur politik secara menyeluruh karena sistem yang ada sampai saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Lebih jauh disampaikan bahwa sistem dengan 13 perdana menteri dan hampir 150 menteri ini sangat berpotensi menciptakan peluang korupsi pada setiap bagian pemerintahan.²³ Di sisi lain, Bosnia Herzegovina juga memiliki tiga presiden yang semakin mempertegas kompleksitas pemerintahan negara tersebut.²⁴

Non Governmental Organization (NGO); Keberadaan *NGO* di Bosnia Herzegovina sebagai parameter proses demokrasi sudah mulai berkembang dan melakukan pergerakan yang signifikan. Namun demikian pola pemerintahan yang sangat kompleks dan budaya diskriminasi yang sudah sangat melekat menyebabkan pergerakan *NGO* di negara tersebut belum mampu membawa perubahan yang signifikan.

Partai Politik; Bosnia Herzegovina merupakan negara yang menerapkan sistem multipartai sebagai salah satu bentuk komitmennya dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Menjelang pemilihan umum pada bulan Oktober 2014, sejumlah partai tercatat ikut dalam perpolitikan baik di Federasi Bosnia Herzegovina maupun Republik Srpska. Dalam Federasi Bosnia Herzegovina, Partai *SDA* yang dipimpin oleh Bakir Izetbegovic memenangkan kursi kepresidenan. Selain itu terdapat partai *Union*

¹⁹ *Embassy of Bosnia and Herzegovina, 2003, General Directions and Priorities for Implementation of Foreign Policy of Bosnia and Herzegovina*, diakses melalui http://www.bhembassy.be/foreign_policy.html pada 12 Maret 2016, pukul 22:22

²⁰ *Elvira M. Jukic, 2015, Bosnia Eyes WTO Membership in 2015*, diakses melalui <http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-eyes-wto-membership> pada 12 Maret 2016, pukul 22:25

²¹ *European Union, (2014), Will Bosnia-Herzegovina ever join the European Union?* diakses melalui <http://www.debatingeurope.eu/2014/04/16/will-bosnia-herzegovina-ever-join-european-union/#.VrhYexh97Mw> pada tanggal 08 Februari 2016

²² *Alberto Nardelli, Op.cit*

²³ *European Union, (2014), Will Bosnia-Herzegovina ever join the European Union?* diakses melalui <http://www.debatingeurope.eu/2014/04/16/will-bosnia-herzegovina-ever-join-european-union/#.VrhYexh97Mw> pada tanggal 08 Februari 2016

²⁴ *Alberto Nardelli, Op.cit*

for a Better Future of BiH (SBB). Partai yang berdiri pada tahun 2009 oleh Fahrudin Radoncic, Partai BiH (SBB) ini mulai mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Selanjutnya terdapat partai *The BiH Patriotic Party (BPS)* yang berdiri pada tahun 1996 dan memenangkan tiga kursi serta *Party of Democratic Activity (A-SDA)* yang berdiri pada tahun 2008 dan memenangkan satu kursi.²⁵ Dalam melaksanakan pemilu di Republika Srpska beberapa partai memilih untuk melakukan koalisi di antaranya: *Serb Democratic Party (SDS)*, *Party of Democratic Progress (PDP)*, dan *Democratic People's Alliance (NDP)*. Partai koalisi ini banyak menyerukan mengenai stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penguatan hubungan dengan Uni Eropa.

Pengalaman; Kompleksitas sistem pemerintahan Bosnia Herzegovina menimbulkan berbagai masalah terutama pada ketidaksamaan perkembangan politik, hukum, maupun masalah kemanusiaan. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah ketika tahun 2013 Republika Srpska mengadopsi strategi baru untuk memerangi korupsi, di sisi lain Distrik Brcko dan Catton masih belum menunjukkan usaha untuk menurunkan tingkat korupsi di wilayahnya. Selain itu, merenggangnya hubungan diplomatic antara dewan menteri di Distrik Brcko dengan Uni Eropa nampaknya tidak menimbulkan kerenggangan hubungan diplomatik Republik Srpska dengan Uni Eropa. Di sisi kemanusiaan, hampir di seluruh wilayah negara telah mengadopsi ketentuan Uni Eropa. Namun demikian, penerapan atas kebijakan tersebut masih tidak seimbang. Hal ini terjadi di wilayah Republik Srpska yang masih mengalami stagnasi dalam penerapan hukum kemanusiaan.²⁶

III. KESIMPULAN

Proses panjang yang dilalui oleh Bosnia Herzegovina dalam memenuhi syarat yang ditentukan oleh Uni Eropa yaitu Kriteria Kopenhagen meliputi dua bagian besar, yaitu kriteria substantif dan formal. Kriteria substantif meliputi politik dan ekonomi. Kriteria politik merupakan salah satu faktor penting bagi negara kandidat yang harus dipenuhi untuk diterima menjadi negara anggota Uni Eropa. Dalam hal ini ditekankan bahwa Bosnia Herzegovina wajib memiliki lembaga stabilitas yang menjamin berjalannya demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan penghormatan serta perlindungan kaum minoritas. Kriteria formal meliputi negosiasi, *level of agreement*, dan aktor.

²⁵ *European Parliament, (September 2015), Bosnia and Herzegovina: Political parties*, diakses melalui [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568324/EPRS_ATA\(2015\)568324_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568324/EPRS_ATA(2015)568324_EN.pdf) pada tanggal 08 Februari 2016

²⁶ *Progress Report Bosnia and Herzegovina, 2014, hal 6 – 17*

Berdasarkan kriteria dalam Kriteria Kopenhagen, masih ada beberapa kriteria yang belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Bosnia Herzegovina, seperti situasi politik dan pemerintahan yang belum stabil dan belum demokratis. Pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah politik, sosial, dan ekonomi, banyaknya demonstrasi, kasus-kasus kemanusiaan, diskriminasi kaum perempuan dan minoritas. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan kelas di lembaga pendidikan yang dibagi berdasarkan agama dan strata sosial. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mampu mengurus negara dengan baik.

Proses Bosnia Herzegovina untuk diterima menjadi negara anggota Uni Eropa tergantung dari kemampuan pemerintahnya dalam mengendalikan stabilitas politik dan ekonomi di dalam negerinya. Fokus perhatian ini lebih ke faktor internal Bosnia Herzegovina. Rezim pemerintahan yang tengah berupaya membenahi stabilitas dalam negerinya dituntut lebih *concern* dalam menyelesaikan beberapa isu penting yang disorot oleh Uni Eropa jika ingin diterima menjadi negara anggota Uni Eropa. Pemerintah Bosnia Herzegovina dapat menempuh cara-cara yang dilakukan atau dipenuhi oleh Ceko, Polandia, dan Hongaria sehingga diterima menjadi negara anggota Uni Eropa. Agenda Uni Eropa dalam memperluas keanggotaan hingga meliputi Eropa Timur merupakan salah satu proses globalisasi dalam bidang politik dan ekonomi. Negara anggota Uni Eropa dapat saling menopang dan dapat dilihat dari dukungan Uni Eropa dalam mendorong Bosnia Herzegovina untuk segera menyelesaikan masalah dalam negerinya seperti tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum. Perbaikan dalam tata pemerintahan dan supremasi hukum ini dapat memperbesar peluang Bosnia Herzegovina untuk diterima menjadi negara anggota Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chandler, D, *From Dayton to Europe*. International Peacekeeping, 2005.
- [2] Kaczorowska, A, *European Union Law*. Rout ledge, 2008.
- [3] Saaty, T. L, *What is the Analytic Hierarchy Process?* Springer Berlin Heidelberg, 1988.
- [4] Schimmelfenning, Frank and Ulrich Sedelmeier, *The Politics of European Union Enlargement*. New York: Rout ledge, 2005.
- [5] Elvira M. Jukic. (2015) Bosnia Eyes WTO Membership in 2015, [Online]. Available: <http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-eyes-wto-membership>.
- [6] (2003) Embassy of Bosnia and Herzegovina, General Directions and Priorities for Implementation of Foreign Policy of Bosnia and Herzegovina. [Online]. Available: http://www.bhembassy.be/foreign_policy.html.
- [7] (2014), European Union. Will Bosnia-Herzegovina ever join the European Union? [Online]. Available: <http://www.debatingeurope.eu/2014/04/16/will-bosnia-herzegovina-ever-join-european-union/#.VrhYexh97Mw>.

- [8] (2015) European Parliament, Bosnia and Herzegovina: Political parties. [Online]. Available: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568324/EPRS_ATA\(2015\)568324_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568324/EPRS_ATA(2015)568324_EN.pdf).
- [9] (2015) Freedom House Organization, Bosnia Herzegovina. [Online]. Available: <https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/bosnia-and-herzegovina>.
- [10] (2014) Human Right House Foundation, Bosnia and Herzegovina: chance to take steps to improve its human rights record. [Online]. Available: <http://humanrightshouse.org/Articles/20500.html>.
- [11] Huntington, S. P, "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century," *University of Oklahoma Press*, vol. 4, 1993.
- [12] Vachudova, M. A, "EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzles of Enlargement Ten Years on JCMS," *Journal of Common Market Studies*. 2014.
- [13] Progress Report Bosnia and Herzegovina, 2014.
- [14] Progress Report Bosnia and Herzegovina. Oktober 2015.
- [15] Teguh Pamuji, "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia", Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro. [Online]. Available: <http://core.ac.uk/download/pdf/11717596.pdf>.